

## BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Proper

Edisi : 26 Juli 2008  
Halaman : 12

### Kategori Emas dalam Pertimbangan

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau KNLH mempertimbangkan memberikan kategori emas bagi satu dari 516 perusahaan peserta program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika itu terjadi, itu emas pertama kali yang diberikan.

"Kategori emas bisa diartikan nol emisi. Dalam hal ini ada pencapaian melebihi standar ketaatan," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar se usai menerima laporan Dewan Pertimbangan Proper di kantornya, Jumat (25/7). Perusahaan tersebut adalah perusahaan pembangkit energi.

Program Proper menilai indikator dampak usaha, setidaknya pada air, tanah, dan udara, ditambah faktor sistem manajemen lingkungan, konservasi sumber daya, dan pembangunan komunitas.

Pencapaian melebihi standar terlihat dari indikator penilaian minimal berdasarkan baku mutu, juga kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memandirikan masyarakat. "Yang terbaik di antara kategori hijau dimungkinkan dapat emas," kata Asisten Deputi IV Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), Manufaktur, dan Agroindustri Emma Rachmawaty.

Rachmat mengatakan, kategori emas belum diputuskan. Pihaknya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum diumumkan resmi pekan depan.

Dari hasil penilaian 516 perusahaan peserta Proper, KNLH merasa puas melihat perkembangan jumlah peserta dan hasil penilaian. Sebanyak 130-an perusahaan dapat kategori merah dan hitam—ini berarti di bawah standar baku mutu.

#### Penghargaan dan sanksi

Ketua Dewan Pertimbangan Proper yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Surna T Djajadiningrat, mengungkapkan, pihaknya membahas rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi. "Yang bagus dan terus taat akan diberi insentif. Sebaliknya, yang hitam terus-menerus dijatuhi sanksi," kata dia.

Insentif yang dibahas dapat berupa pemotongan pajak dan kemudahan mengajukan kredit perbankan. Soal disinsentif, lanjut Rachmat, akan dikenakan pada perusahaan yang tidak berusaha beranjak dari hitam. (GSA)